

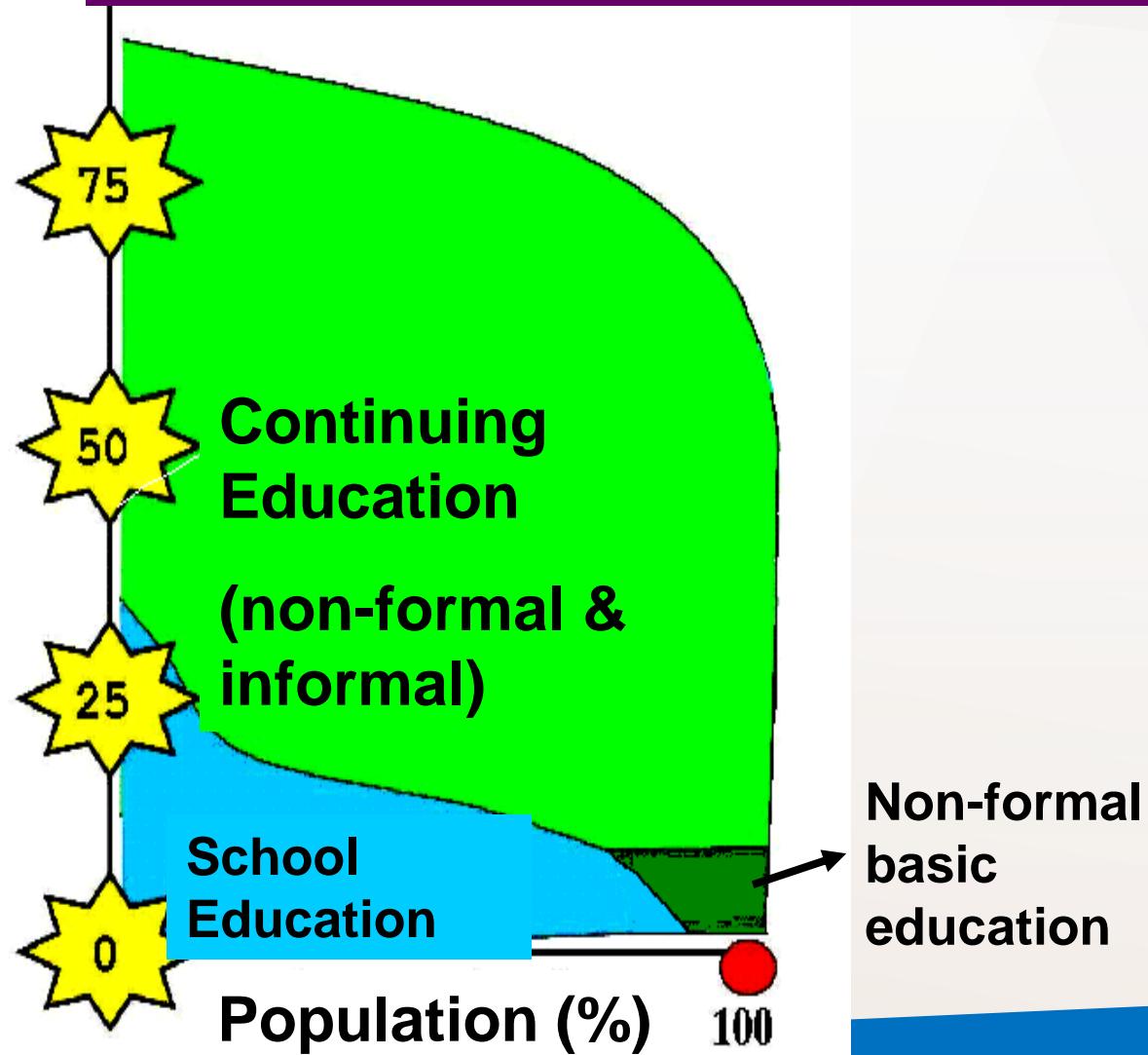


Strategi Kebijakan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Promotion of Lifelong learning





Time

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Lifelong

Integrated

Senior

Middle

Adult

Youth

School age

Childhood

Age

Home

School

Work

Community District/State

Space

Life wide

KEBIJAKAN PEMERINTAH

SEKOLAH RESPONSIF GENDER

- Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan,
- Peningkatan mutu dan relevansi, menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk dewasa, dan
- Tata kelola dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

- Pokja PUG Pusat, Propinsi, Kab/Kota
- PPRG
- Data-data
- PKBG
- SPRG

- Responsif gender menyempitkan kesenjangan berdasarkan data awal
- Netral gender tidak mengarah salah satu jenis
- Bias Gender: Menekan terjadinya pemihakan salah satu jenis

Kualitas SDM

Prestasi belajar laki-laki dan perempuan yg memiliki keunggulan masing-masing

Modal pembangunan

STRATEGI PELAKSANAAN

SEKOLAH RESPONSIF GENDER

Tim POKJA PUG
Kemdikbud RI

Tim POKJA PUG
Tk Propinsi

Tim POKJA PUG
Tk Kabupaten/Kota

Satgas PUG Di Satuan
Pendidikan

Permendiknas no 84/2008, pedoman pelaksanaan PUG bidang Pendidikan : mengintegrasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan

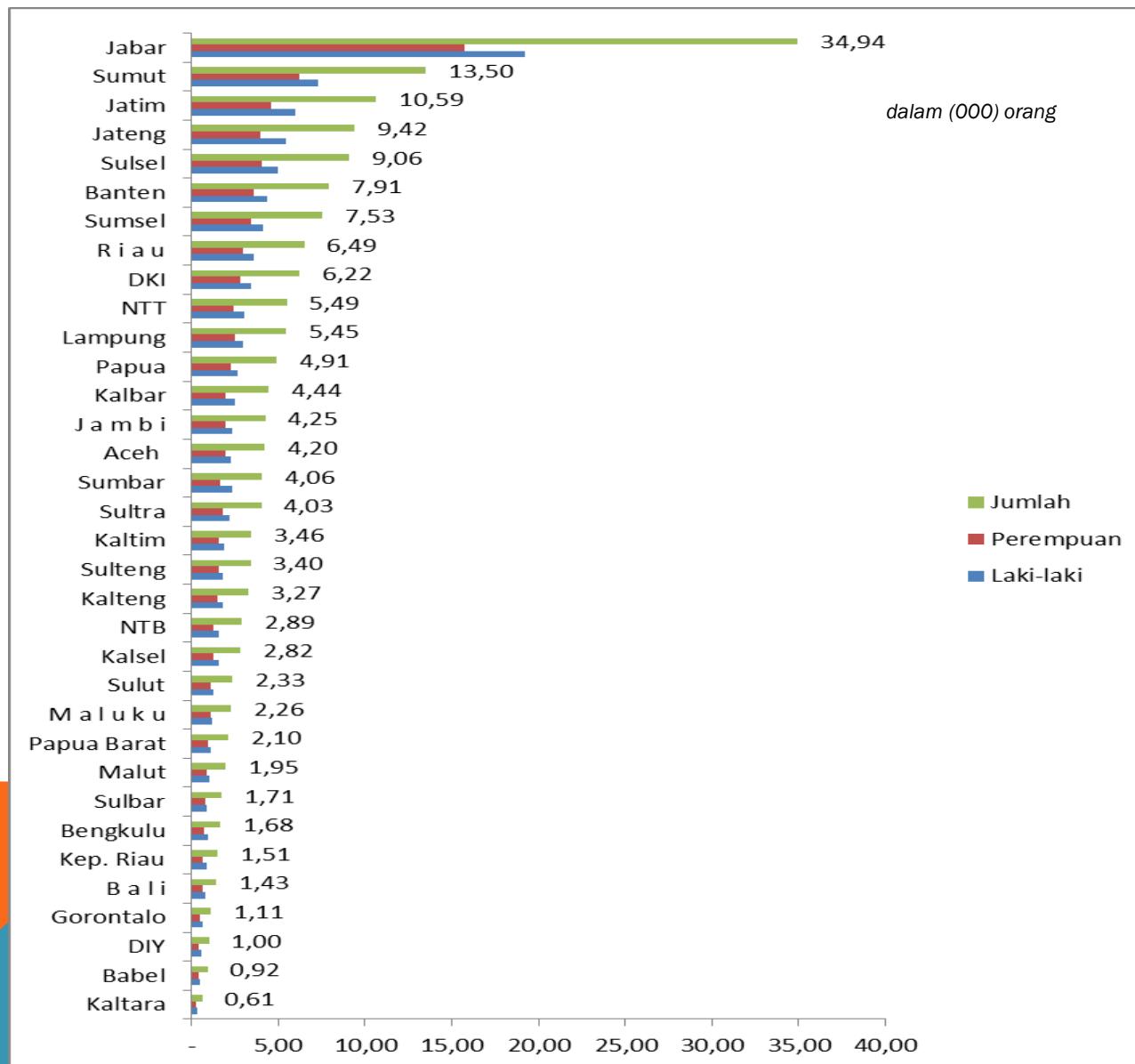
Permendiknas no 84/2008: 1. memperromosikan dan memfasilitasi PUG ke unit kerja terkait, 2. sosialisasi dan advokasi PUG bidang pendidikan unit pemerintaha tingkat bawah, 3.menyusun program kerja setiap tahun, 4.mendorong anggaran yg responsif gender, 5. menyusun rencana kerja pokja PUG bidang pendidikan setiap tahun, 6. bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui dinas pendidikan bagi pokja Kab/kota dan gubernur bagi pokja Propinsi 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota bagi pokja Kab/kota dan gubernur bagi pokja Propinsi; 8. menfasilitasi unit kerja yang membidaungi pendataan untuk menyusun Profil Gender Bidang ; 9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan di instansi terkait; 10.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran pendidikan daerah; 11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Pendidikan di provinsi yang mencakup:

- ❖ PUG dalam peraturan perundang-undangan bidang pendidikan;
- ❖ PUG dalam siklus pembangunan bidang pendidikan;
- ❖ penguatan kelembagaan PUG Bidang Pendidikan; dan
- ❖ penguatan peran serta masyarakat untuk pendidikan.

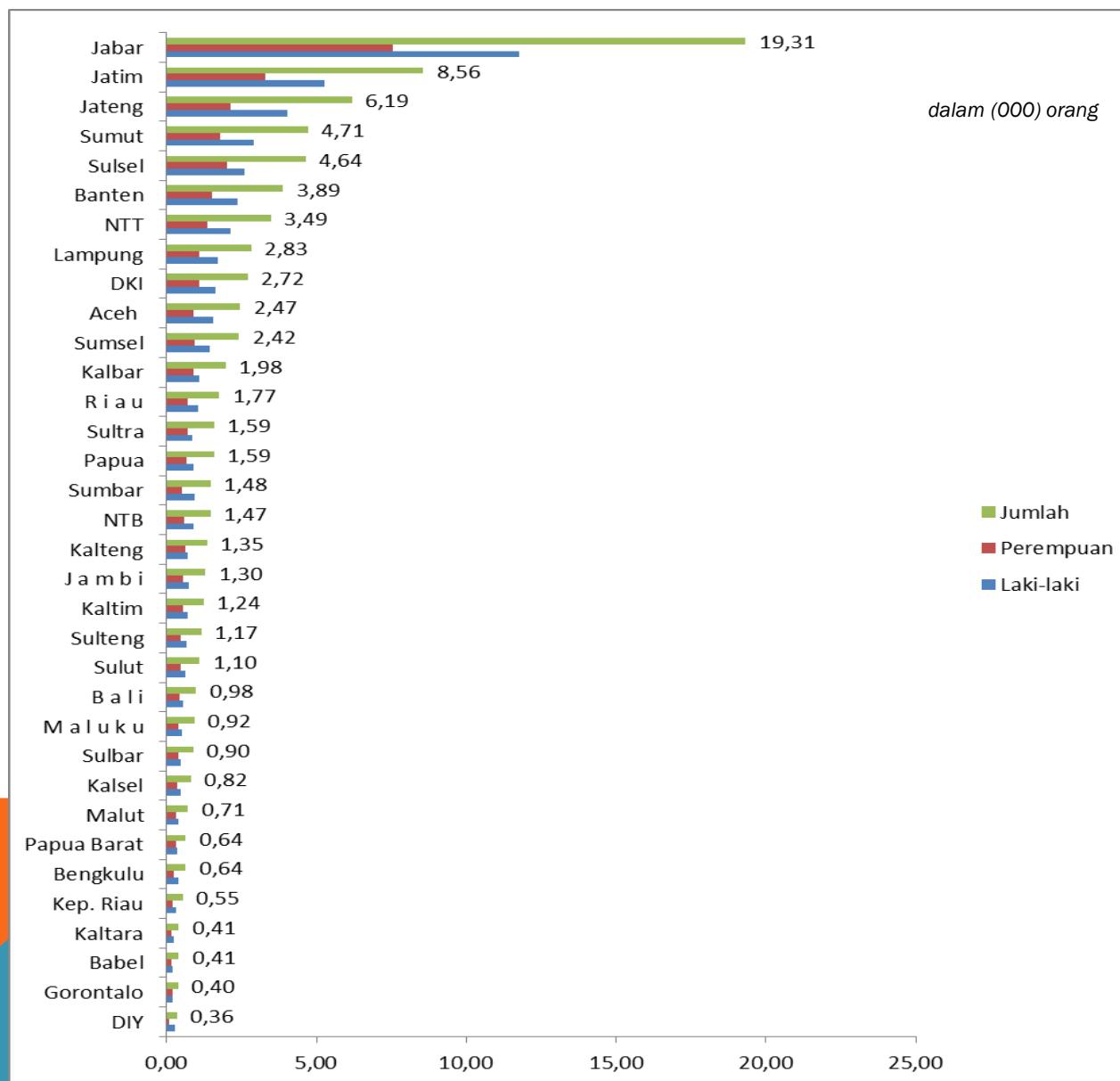
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan penggerak kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

1. mempromosikan dan menfasilitasi PUG Bidang Pendidikan kepada seluruh pihak terkait di unit kerjanya;2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan, 3. menyusun program kerja setiap tahun; 4. mendorong terwujudnya anggaran satuan pendidikan yang berperspektif gender; 5. menyusun rencana kerja POKJA PUG Bidang Pendidikan setiap tahun; 6. menyusun laporan (data gender)

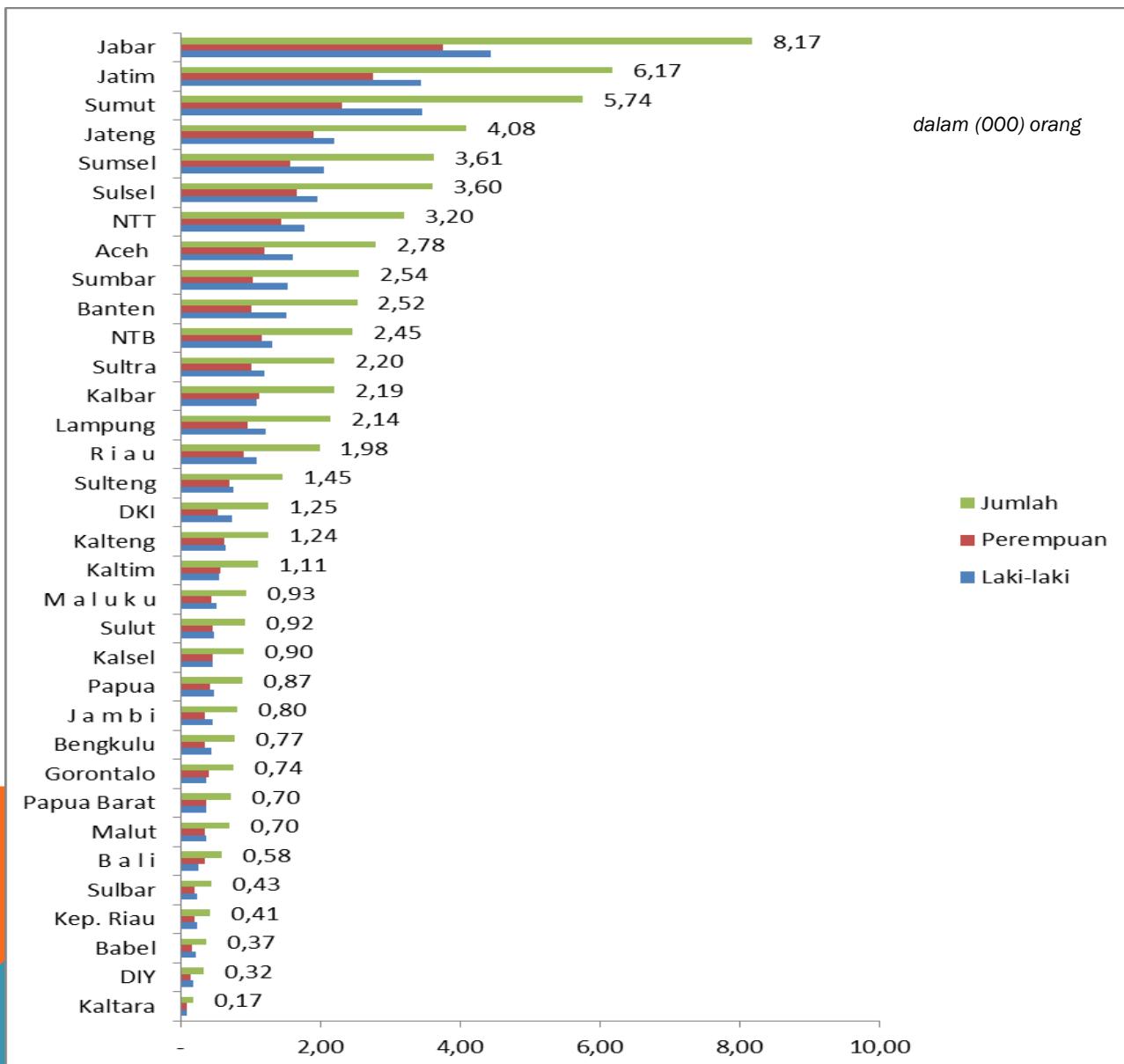
ANGKA DO SD/ SETARA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015



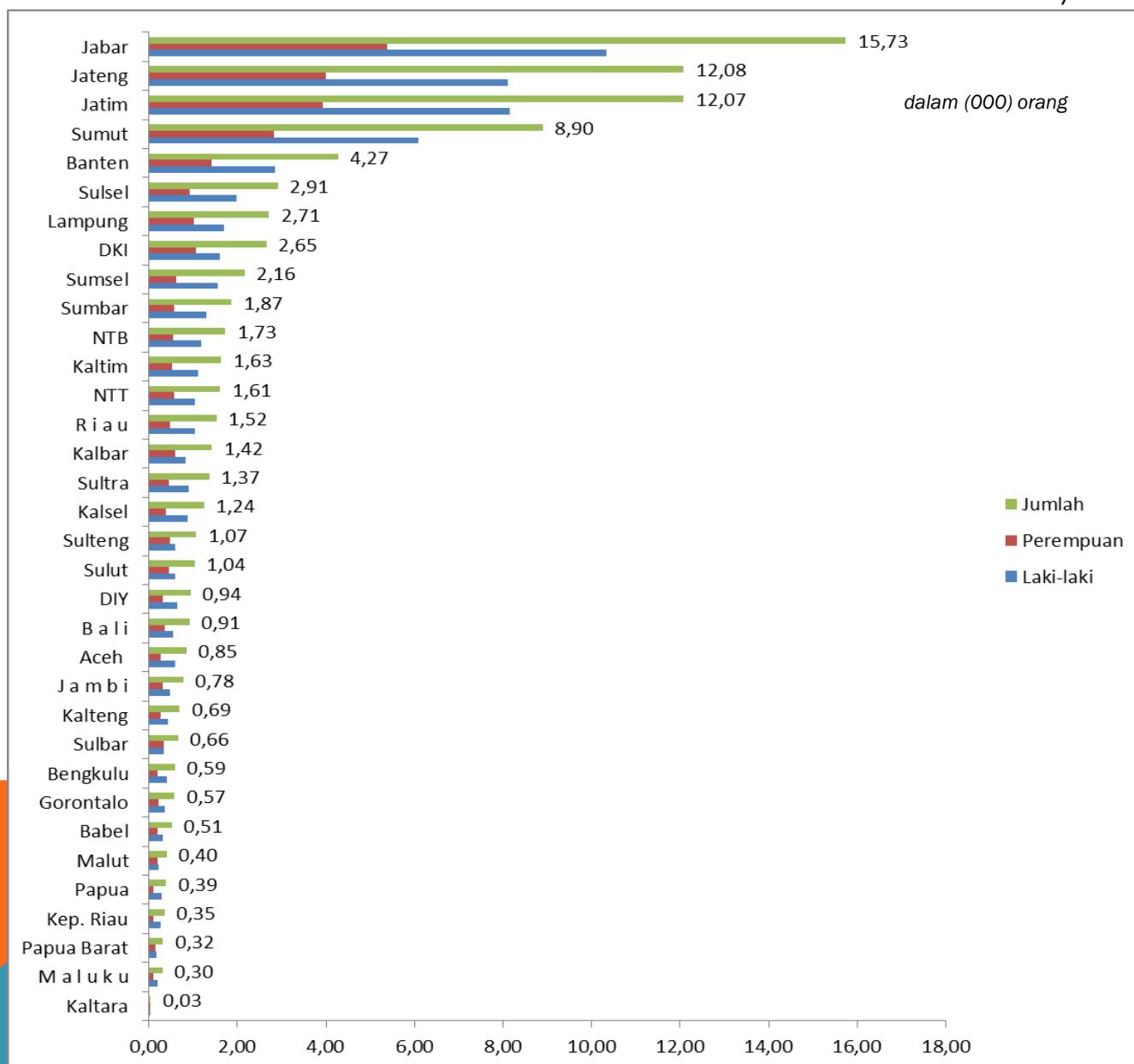
ANGKA DO SMP/ SETARA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015



ANGKA DO SMA BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015



ANGKA DO SMK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER PROVINSI TAHUN 2014/2015



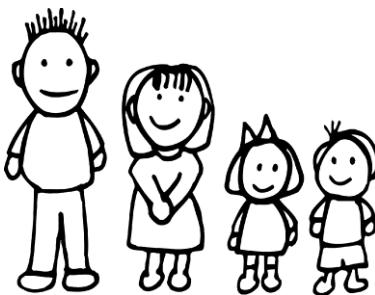
Program Terobosan Keaksaraan dan Kesetaraan

Terobosan

**“Gerakan Pendidikan Pemberdayaan
Perempuan Marjinal”**



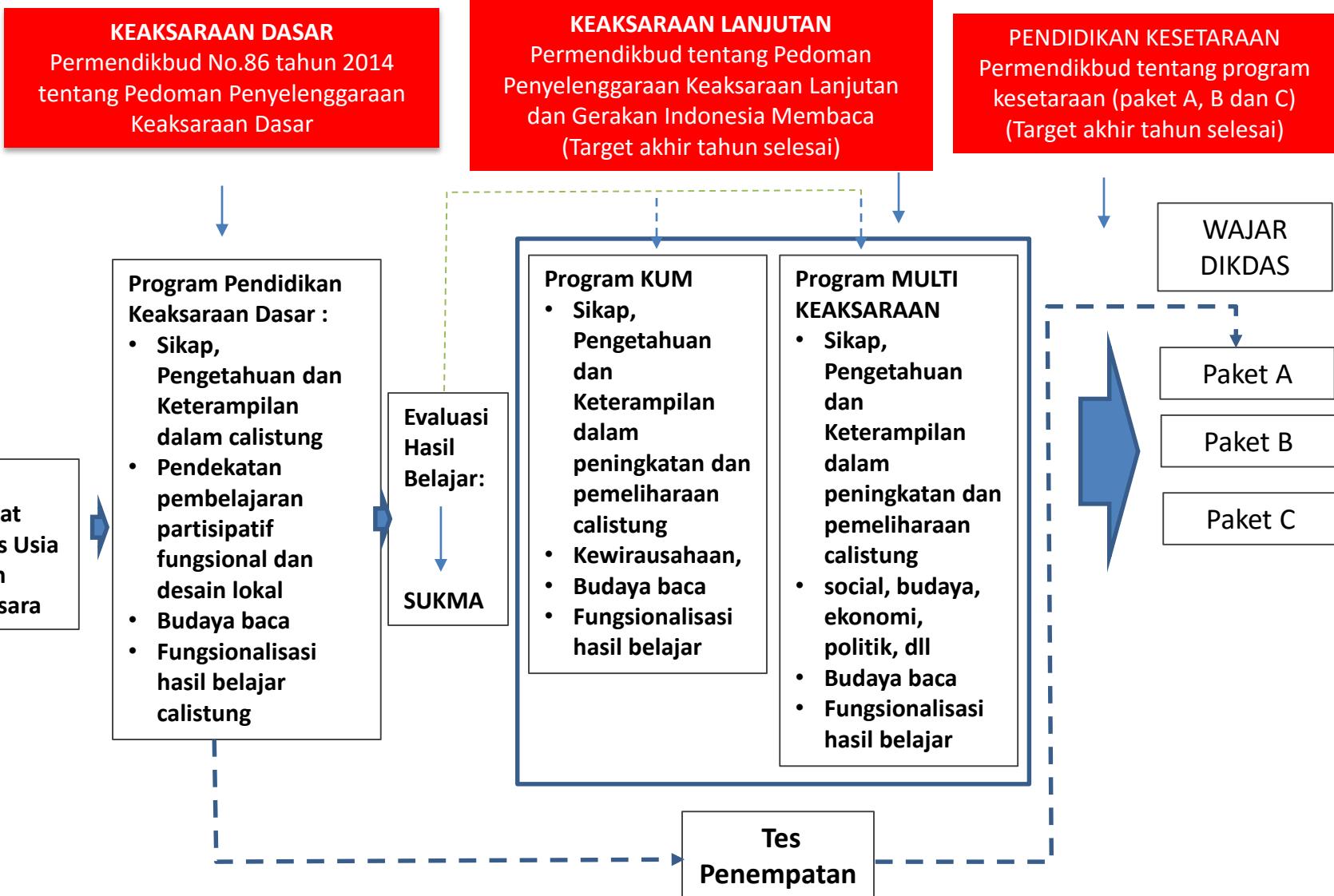
Mengapa Perempuan Marjinal?



- Dua per tiga penduduk buta aksara dan 60% warga belajar pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah perempuan
- Fungsional Perempuan dalam keluarga sangat memperngaruhi kesejahteraan keluarga
- Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan bagi perempuan
- Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan yang berimbang pada pendidikan generasi berikutnya

GRAND DESIGN PENDIDIKAN KEAKSARAAN & KESETARAAN

(Pra Wajar Dikdas)



Rincian Kegiatan

PKH Perempuan

PKRG (Pendidikan Keluarga Responsif Gender)

KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri)

Pendidikan Kesetaraan Vokasi

Stakeholders:

Akademisi (Program Studi PLS, PSW/G), Pokja PUG, 18 Ormit Bindiktara & Ormas Perempuan

2015



Pencanangan HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)

2016



Setiap Provinsi

Ormit Bindiktara

1. Forum TBM
2. Forum PKBM
3. Forum Tutor Keaksaraan
4. Forum Kesetaraan
5. Forum SKB
6. Oase KK
7. PSW/G
8. Dewan Masjid Indonesia
9. Majelis Taklim
10. Asosiasi Pondok Pesantren
11. Dewan Gereja/PGI
12. Pokja PUG
13. Prodi PLS
14. PKK
15. Aisyiyah
16. Muslimat NU
17. Paguyuban Rumpin
18. Asahpena
19. dll

“Gerakan Indonesia Membaca”

Buta Aksara 15-59 Tahun Nasional (Tahun 2013)

3,70%

Penduduk Usia 15-59 Tahun **81.168.403** orang
yang masih buta aksara sebanyak

5.984.075 orang



Semua kegiatan dikaitkan dengan Perayaan Hari Aksara Internasional (HAI)
tingkat Nasional dan Provinsi



Mengapa Indonesia Membaca?

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
(6 Provinsi dan 25 Kabupaten Terpadat)

Melibatkan Komunitas Membaca (TBM, Forum TBM
13 Ormit Bindikara & Ormas Perempuan)

“Donasi Buku” (sesuai inisiatif daerah)

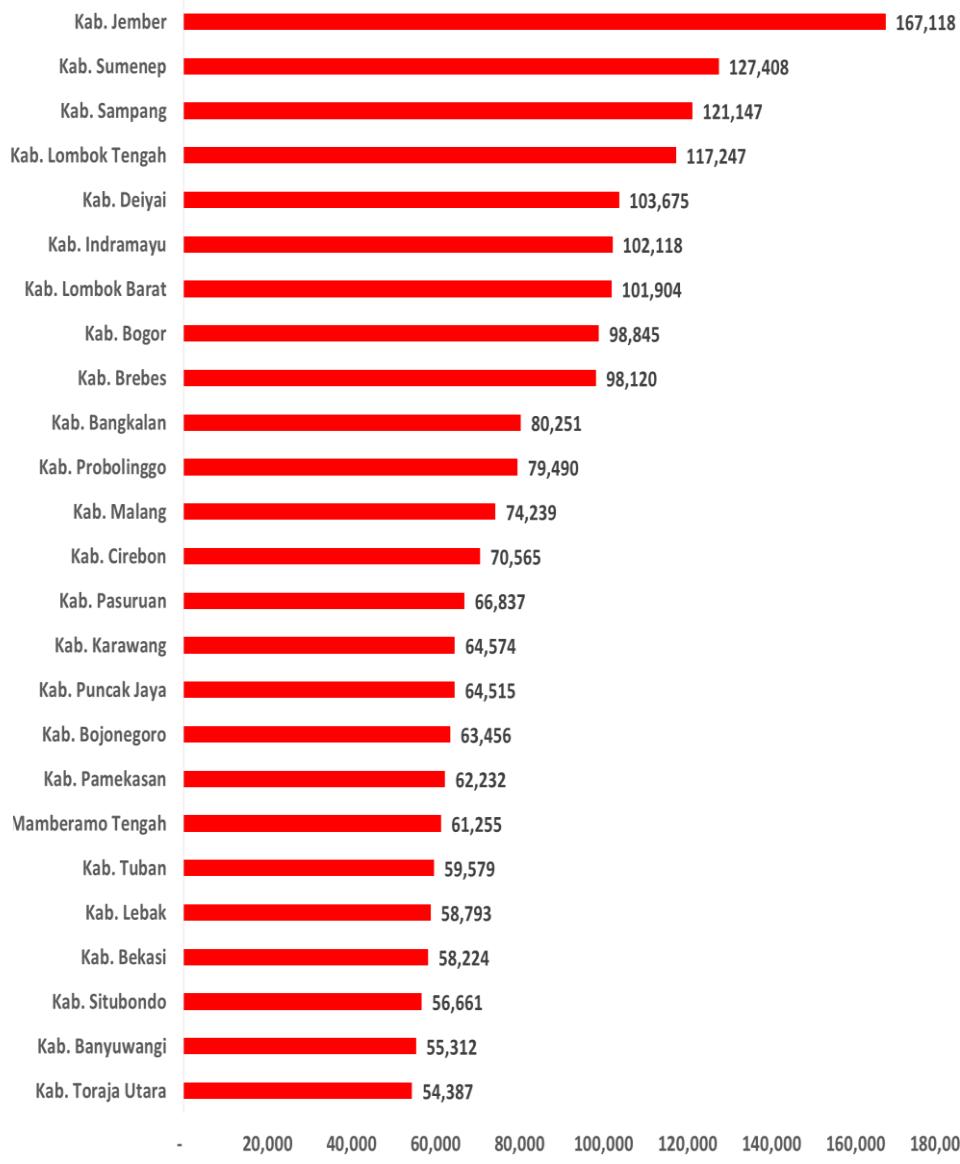
Tahun 2016 Seluruh Provinsi dan 25
Kabupaten Terpadat

Daerah Terpadat Buta Aksara 2014

Terdapat **6** Provinsi
dan
25 Kabupaten Terpadat
Buta Aksara Tahun 2014



Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2015



Terima kasih ...

Informasi terkait Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bisa diakses
melalui laman:
www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/